

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebencanaan dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini telah menjadi kajian yang menarik untuk dibahas, hal ini dikarenakan berbagai kejadian bencana yang tidak terduga telah membukakan mata semua pihak tentang betapa pentingnya penanggulangan terhadap bencana dimasa yang akan datang. Indonesia merupakan suatu negara dikawasan Asia-Pasifik yang rawan akan terjadinya bencana alam, hal ini mendorong pemerintah untuk membentuk otoritas dan sistem penanggulangan bencana nasional yang mumpuni dalam penanganan respons bencana secara efektif, hal ini sejalan dengan kerangka aksi *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* yang menyatakan bahwa pengurangan resiko bencana salah satunya adalah investasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat.

Bencana yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, geologis, demografis, serta sosiologis Indonesia, hal ini juga menegaskan bahwa bencana merupakan ancaman serius yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan geoportal data bencana Indonesia sepanjang tahun 2022 terjadi sebanyak 3.522 kejadian. Data tersebut meliputi 28 kejadian gempa bumi, 1 erupsi gunung api, 1.520 banjir, 1.057 cuaca ekstrem, 634 tanah longsor

634.152 bencana kebakaran hutan dan lahan, 8.726 orang luka-luka, dan setidaknya 5.423.652 orang menderita.¹



¹ *gis.bnpb.go.id*, di akses pada 9 Mei 2023, pukul 15.37 WIB.

Berdasarkan dimensi perundang-undangan sejatinya pemerintah Indonesia telah memperkenalkan beberapa landasan hukum yang mengatur tentang kebencanaan, langkah ini merupakan suatu kemajuan yang signifikan, setidaknya penanganan bencana akan lebih standar dan terlembagakan. Meskipun proses penanggulangan serta penanganan bencana di Indonesia terlihat masih parsial dan kurang responsif serta belum terlembaga dengan baik, serta kurangnya koordinasi sejak proses pencegahan serta evakuasi area pengungsian yang kurang representatif dan penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran, sedangkan disisi lainnya jumlah fenomena kejadian bencana yang volumenya terus meningkat di Indonesia menjadi alasan utama bahwa sejatinya pemerintah harus lebih meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dalam perspektif kebijakan publik dapat dikatakan bahwa dalam proses perencanaan, perumusan, dan implementasi program serta evaluasi dalam penanganan bencana di Indonesia masih banyak terhalang oleh berbagai masalah, mulai dari belum tersosialisasinya peraturan perundangan, belum terbentuknya lembaga di daerah, sumber anggaran yang terbatas, dan lebih dari semua itu adalah masalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana. Selain itu, dibutuhkan juga peran serta dari pemerintah daerah untuk menjadi entitas paling depan dalam program penanggulangan bencana. Sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap daerahnya, pemerintah daerah perlu memiliki program tersendiri yang disesuaikan dengan kemampuan serta karakteristik geografis maupun sosiologis dari daerahnya masing-masing.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera serta salah satu Provinsi yang sangat rentan terhadap berbagai potensi bencana. Hal ini didasari karena pergerakan lempeng bumi yang membujur di sepanjang pesisir bagian barat pulau Sumatera serta keberadaan empat segmen aktif patahan bumi yang terdapat di Sumatera Barat seperti segmen Sianok, segmen Suliki, segmen Sumani dan segmen Sumpur yang berpotensi menimbulkan gempa di kawasan Bukit Barisan yang melintasi Sumatera Barat². Berikut ini adalah potensi bencana di Sumatera Barat pada tahun 2018-2022 :

Tabel 1. 1
Potensi Bencana di Sumatera Barat 2018-2023

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					Potensi Bencana
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Agam	209.2	209.2	209.2	193.5	193.5	Tinggi
2.	Dharmasraya	143.2	143.2	143.2	137.6	137.6	Sedang
3.	Mentawai	197.2	197.2	197.2	197.2	197.2	Tinggi
4.	Kota Bukittinggi	130.0	130.0	130.0	130.0	128.0	Sedang
5.	Kota Padang	191.6	169.9	169.9	181.7	179.0	Tinggi
6.	Kota Padang Panjang	113.2	113.2	113.2	113.2	113.2	Sedang
7.	Kota Pariaman	171.2	171.2	171.2	171.2	157.3	Tinggi
8.	Kota Payakumbuh	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	Sedang
9.	Kota Sawahlunto	113.2	113.2	113.2	113.2	101.0	Sedang
10.	Kota Solok	125.2	125.2	125.2	125.2	125.2	Sedang
11.	Lima Puluh Kota	119.2	119.2	119.2	119.2	119.2	Sedang
12.	Padang Pariaman	184.0	180.7	167.2	156.7	156.7	Tinggi
13.	Pasaman	178.0	178.0	178.0	176.8	176.8	Tinggi
14.	Pasaman Barat	203.2	203.2	203.2	203.2	203.2	Tinggi
15.	Pesisir Selatan	143.2	143.2	143.2	137.7	137.7	Tinggi
16.	Sijunjung	107.2	107.2	107.2	107.2	107.2	Sedang
17.	Solok	137.2	137.2	137.2	137.2	137.2	Sedang
18.	Solok Selatan	137.2	137.2	137.2	137.2	137.2	Sedang
19.	Tanah Datar	125.2	125.2	125.2	125.2	125.2	Sedang
	Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2022	144.4					Tinggi

². Dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Indeks risiko Bencana Indonesia Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022 Provinsi Sumatera Barat memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 144.4. Indeks risiko bencana pada setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat tergolong sedang-tinggi, dari 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat terdapat 11 Kabupaten dan Kota yang memiliki indeks risiko bencana yang sedang, dan 8 Kabupaten dan Kota yang memiliki indeks risiko bencana yang tinggi dimana salah satunya adalah Kabupaten Pasaman dengan nilai 176.8.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki indeks kerawanan bencana yang tinggi di Sumatera Barat, hal ini diakibatkan karena keberadaan Kabupaten Pasaman yang terletak pada jajaran patahan Semangka (Sesar Sumatera) dan terletak diantara dua Segmen aktif yakni Segmen Sumpur dan Segmen Talamau ditambah lagi dengan rata-rata curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan banyaknya peristiwa bencana terutama pada musim penghujan di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan data yang peneliti temukan berikut ini tabel 1.2 adalah potensi kejadian bencana yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2018-2022 di Kabupaten Pasaman :

Tabel 1. 2

Potensi Bahaya Bencana di Kabupaten Pasaman Tahun 2018-2023

No	Bencana	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah	Luas (Ha)	Potensi
1.	Banjir	9	8	15	11	9	52	110.703,40	Tinggi
2.	Tanah	5	4	6	9	7	31	98.15	Tinggi

	Longsor							6,87	
3.	Kebakaran Hutan	4	1	3	2	1	11	87.98 1,76	Sedang
4.	Angin Kencang	18	15	8	14	12	67	73.80 2,21	Tinggi
5.	Pohon Tumbang	27	23	39	32	29	150	64.78 6,33	Tinggi
6.	Banjir Bandang	15	9	10	8	6	48	66.90 1,46	Tinggi
7.	Kekeringan	4	2	3	8	7	24	56.13 8,78	Sedang
	Jumlah	82	62	84	84	71	383		

Sumber : Dokumentasi KRB BPBD Kabupaten Pasaman Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 2018-2022. Setidaknya terjadi 383 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir, tanah longsor, angin kencang dan pohon tumbang di Kabupaten Pasaman. Potensi akan bahaya bencana yang terjadi di Kabupaten Pasaman bervariasi yaitu ada yang berada pada kelas tinggi dan sedang. Selaras dengan kejadian serta dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi di Indonesia maka sejatinya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas bencana dari pemerintah Indonesia, sebagaimana yang termazkur didalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai legitimasi hukum tentang kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.

Hal ini juga merupakan suatu bentuk pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat. Kotler menafsirkan bahwa suatu pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, yang pada atas dasarnya tidak memiliki wujud serta tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan urusan kebencanaan merupakan suatu bentuk pelayanan dasar yang oponen bagi pemerintah Indonesia, sebagaimana yang termazkur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Fenomena bencana banjir merupakan jenis ancaman bencana serius yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman, dimana bencana banjir merupakan jenis bencana tahunan yang sering terjadi, serta jenis bencana yang sering menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi masyarakat pada setiap daerah Kecamatan di Kabupaten Pasaman, hal ini mungkin dikarenakan keadaan dari letak Geografis dan Topografi Kabupaten Pasaman, dimana wilayah Kabupaten Pasaman terdapat banyak sungai, setidaknya terdapat 10 sungai besar dan 197 sungai kecil yang tersebar di setiap kecamatan serta rata-rata curah hujan yang tinggi. Hal ini juga tidak terlepas dari masih banyaknya ditemukan kasus pembalakan hutan serta penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat pada bagian hulu sungai pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Pasaman. Berikut ini data terkait potensi bahaya bencana banjir di Kabupaten Pasaman :

Tabel 1. 3

Potensi Bahaya Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Pasaman

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Jumlah Penduduk	Kelas Risiko
1.	Bonjol	194,32	26839	Sedang
2.	Lubuk Sikaping	346,5	45436	Sedang
3.	Mapat Tunggul	605,29	9393	Sedang
4.	Mapat Tunggul Selatan	471,72	9496	Tinggi
5.	Rao	236,18	23986	Sedang
6.	Panti	212,95	38493	Tinggi
7.	Rao Selatan	338,98	22787	Sedang
8.	Rao Utara	598,63	10663	Sedang
9.	Tigo Nagari	352,92	26135	Tinggi
10.	Duo Koto	360,63	26900	Sedang
11.	Padang Gelugur	159,95	23801	Sedang
12.	Simpang Alahan Mati	69,56	11799	Sedang
	Total	3947, 63	275728	

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Pasaman 2022

Berdasarkan tabel 1.3 menjelaskan potensi risiko bahaya bencana pada setiap Kecamatan di Kabupaten Pasaman, dapat dilihat bahwa terdapat tiga kecamatan yang memiliki potensi bahaya bencana yang tinggi, hal ini dihitung berdasarkan jumlah rata-rata kejadian bencana yang terjadi pada setiap Kecamatan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa terdapat tiga Kecamatan yang memiliki potensi bahaya bencana yang tinggi diantaranya adalah Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kecamatan Panti dan Kecamatan Tigo Nagari. Hal ini juga menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pasaman agar selalu menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menghentikan beberapa kasus

pembalakan hutan dan penambangan liar di Kabupaten Pasaman serta cepat tanggap terhadap kejadian bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi agar risiko dan kerugian dari bencana dapat diminimalisir.

Secara implisit pemerintah Kabupaten Pasaman telah merespon hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 20 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah serta pemerintah daerah. Dimana dalam kegiatan penanggulangan bencana Kabupaten Pasaman memberikan instruksi penuh kepada pihak BPBD Kabupaten Pasaman untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan tersebut merupakan wujud serta komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam membangun masyarakat khususnya dibidang penanggulangan bencana yang akan berdampak pada tingkat ketentraman dan keselamatan masyarakat Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya agenda kebencanaan juga dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh agenda program prioritas dari visi dan misi Kabupaten Pasaman saat ini, dalam pelaksanaannya menginstruksikan penuh pengelolaan bencana kepada pihak BPBD Kabupaten Pasaman yang berpedoman kepada Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 59 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi serta uraian tugas BPBD Kabupaten Pasaman.

Sebagai langkah dalam penjabaran visi dan misi BPBD Kabupaten Pasaman maka dirumuskanlah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan

penanggulangan bencana yaitu menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Adapun kebijakan penanggulangan bencana yang dijalankan oleh BPBD Kabupaten Pasaman sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategi (Renstra) BPBD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

**Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana
BPBD Kabupaten Pasaman Tahun 2018-2023**

NO.	PROGRAM
1.	Program Pencegahan Dini Penanganan Bencana Alam
	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya pencegahan dini dan penanganan bencana alam b. Terbentuknya nagari siaga bencana/desa tangguh bencana c. Tersedianya rambu-rambu peringatan bencana pada daerah rawan bencana d. Terbentuknya kelompok siaga bencana e. Tersusunnya rencana kontinjensi (contingency plan)
2.	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya perlengkapan sar yang mumpuni b. Terlaksananya piket pos penanggulangan bencana dan pengungsi c. Pendataan masyarakat yang terdampak bencana serta pendistribusian logistik
3.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana b. Pemulihan kesehatan dan mental masyarakat pascabencana c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman

Sumber : Dokumen LAKIP BPBD Kabupaten Pasaman 2023

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat disimpulkan terdapat beberapa program dan kegiatan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Pasaman sebagai *leading sektor* penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman. Dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana BPBD Kabupaten Pasaman memiliki kebijakan yang berbunyi “Peningkatkan kesadaran, kemampuan serta kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman dimana dalam prosesnya sudah direalisasikan kedalam beberapa program dan kegiatan. Pada tahapan prabencana BPBD Kabupaten Pasaman mempunyai program yaitu “Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam”, yang secara keseluruhan dalam menanggulangi bencana yang pernah terjadi pada daerah rawan bencana di Kabupaten Pasaman. Peneliti mengangsumsikan bahwa dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini akan dapat mengurangi risiko serta dampak yang diakibatkan oleh bencana di Kabupaten Pasaman. Hal ini menyebabkan perlunya sebuah kajian evaluasi dalam menilai keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufani Ahmad (2022) bahwa pelaksanaan manajemen strategi penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Pasaman sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal sehingga tujuan yang diharapkan belum tercapai sesuai yang diharapkan³. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasaman dari segi kompetensi serta kurangnya sarana prasarana yang dimiliki, hal ini ditambah lagi dengan rendahnya presentasi realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan,

mengakibatkan kebijakan dalam penanggulangan bencana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasaman tidak terealisasi secara optimal.⁴

Maka dari itu perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan bencana terutama dalam bidang pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman dengan maksud dan tujuan agar dapat menentukan kebijakan atau program penanggulangan bencana yang mumpuni serta dapat mencapai target dengan optimal. Penelitian ini akan mendeskripsikan terkait evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasaman pada tahapan pra bencana, dimana BPBD Kabupaten Pasaman memiliki kebijakan “Meningkatkan kesadaran, kemampuan serta kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman”, yang nantinya akan dijalankan dalam program “Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam” dan beberapa kegiatan penunjang yang dilaksanakan pada tahapan pra bencana pada proses penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman.

Hal ini dikarenakan peneliti berasumsi bahwa pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan yang harus menjadi perhatian utama dan serius oleh pemerintah dalam proses penanggulangan bencana, hal ini dikarenakan kebijakan akan pengurangan risiko bencana ini akan menentukan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh kejadian bencana. Dengan memaksimalkan penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahapan ini akan dapat mengurangi risiko serta dampak yang diakibatkan oleh bencana seperti korban jiwa, kerugian ekonomi serta kerusakan lingkungan hidup serta juga dapat meningkatkan

⁴. Taufani Ahmad. 2022. Manajemen Strategi Penanggulangan Bencana Oleh BPBD Kabupaten Pasaman. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, 2022

manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang ujungnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat.

Berkaitan dengan aspek evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana, penelitian terkait sebelumnya oleh Gorata Samuel dkk (2022) yang berjudul *Evaluation of National Disaster Management Strategy and Planning for Flood Management and Impact Reduction in Gaborone Botswana*⁵. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa banjir dan kekeringan merupakan bencana alam paling umum yang terus terjadi di negara Botswana. Bencana ini juga terus mengakibatkan kerugian ekonomi serta korban jiwa yang besar hampir diseluruh negara bagian Botswana Afrika Selatan.

Fenomena yang terjadi di negara Botswana semakin diperparah oleh strategi dan kebijakan penanggulangan bencana yang tidak efektif yang terbatas dalam memberikan pedoman yang komprehensif dan proaktif untuk langkah-langkah mitigasi dan adaptif. Selanjutnya, kegagalan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana Botswana adalah sebagai akibat dari penggunaan kerangka kerja penanggulangan bencana serbaguna yang tidak mengakui bahwa berbagai jenis bencana memiliki tantangan unik masing-masing.

Studi penelitian ini menggunakan siklus manajemen bencana untuk mengevaluasi program strategi dan perencanaan manajemen bencana nasional umum di kota Gaborone Botswana. Strategi umum penanggulangan bencana nasional Botswana tergolong rendah ketika dievaluasi dengan konsep Risk

⁵ Gorata Samuel, Mulalu L. Mulalu, Ditiro B. Moalafhi, Mark Stephen. 2022. Evaluation of National Disaster Management Strategy and Planning for Flood Management and Impact Reduction in Gaborone Botswana, *International journal of disaster risk reduction*, 74, 2022, 102939

Management Performance Index (RMI). Kinerja yang rendah ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya serapan teknologi karena penggunaan kemajuan teknologi untuk menanggapi dinamika perubahan bencana banjir tidak diasimilasi ke dalam strategi, perencanaan, dan kebijakan saat ini yang tampaknya sudah ketinggalan zaman.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Sukeri Khalid, Shazwani Shafiai, (2022) yang berjudul *Flood Disaster Management in Malaysia: An Evaluation of the Effectiveness Flood Delivery System*.⁶ Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan jenis sistem penanggulangan bencana banjir dalam bentuk pengiriman bantuan yang telah digunakan di negara Malaysia dan membuat perbandingan dengan sistem pengiriman bantuan di negara lain. Pada saat ini sistem pengelolaan dalam manajemen bencana banjir sebagian besar merupakan strategi resmi yang didasarkan pada pendekatan pendekatan yang berpusat pada teknologi yang menekankan penerapan teknologi baru dalam pengendalian banjir, peramalan, peringatan dini akan bencana serta sistem evakuasi. Pada negara Malaysia, Dewan Keamanan Nasional (MKN) bertanggung jawab untuk mengendalikan sistem sistem manajemen bencana nasional dan organisasi ini akan menyediakan alustista teknologi dan mesin bantuan yang efektif untuk pemulihan setelah kejadian bencana banjir.

Selain yang terjadi negara Malaysia, negara Thailand juga merupakan salah satu negara di Asia yang rentan akan terjadinya bencana, dapat dilihat dari

⁶ Mohamad Sukeri Khalid, Shazwani Shafiai, 2015, *Flood Disaster Management in Malaysia: An Evaluation of the Effectiveness Flood Delivery System*, *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 5, No. 4, 2015

kejadian bencana banjir pada tahun 2011. Mereka telah memiliki kebijakan penanggulangan bencana banjir, akan tetapi ketika terjadi kejadian bencana mekanisme yang sudah disusun sebelumnya tidak dijalankan dengan sesuai. Setelah pengalaman tersebut, pemerintah Thailand sudah melakukan perbaikan dan belajar dari banjir yang terjadi pada tahun 2011 dan membuat langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk menghadapi banjir di masa depan. Disisi lain, peristiwa banjir yang terjadi pada tahun 2011 juga menimbulkan kesan bahwa pemerintah yang tidak tanggap dengan bencana ini. Hal ini karena, sistem pemberian bantuan tidak dapat diberikan oleh pemerintahan Thailand, hal ini dikarenakan maraknya kasus korupsi di negara ini.

Sedangkan yang terjadi di negara Amerika Serikat memang memiliki resolusi yang lebih efektif dan efisien dalam proses penanggulangan bencana. Namun ketika Badai Katrina menghantam negara bagian New Orleans, Pemerintah tidak mengambil tanggung jawab yang tepat untuk menghadapi bencana ini. Terlepas dari diskriminasi di antara para korban bencana, dimana pemerintah membuat sistem pemberian bantuan yang tidak konsisten serta keterlambatan dalam proses evakuasi bencana menyebabkan para korban menjadi kecewa terhadap pemerintah. Namun, pemerintah Amerika Serikat memiliki program yang disebut National Flood Insurance Program (NFIP) yaitu sejenis program asuransi bencana nasional untuk membantu masyarakat mereka menutupi kerugian akibat bencana.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Zubaida Alazawi dkk (2014) yang berjudul *A Smart Disaster Management System for Future Cities*.⁷ Penelitian ini mencoba menafsirkan bahwa Konsep smart city baru-baru ini telah menjadi pendekatan utama dalam menangani kasus urbanisasi pada beberapa negara. Begitu juga dalam penanggulangan bencana dimana keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi, inklusi digital dan kualitas hidup yang tinggi dianggap elemen penting dalam konsep smart city. Sistem tanggap darurat dan ketahanan adalah salah satu dimensi paling penting dari desain smart city dan future city karena meningkatnya kejadian bencana alam yang sering terjadi seperti bencana Angin Topan yang terjadi di Filipina pada tahun 2013.

Bencana ini menyebabkan kerugian ekonomi dan manusia yang besar setiap tahun di seluruh dunia. Transportasi dan telekomunikasi memainkan peran penting dalam proses tanggap darurat dan manajemen bencana. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem tanggap darurat untuk berbagai bencana dengan berbagai bencana dengan fokus pada sistem transportasi. Pihak pemerintah telah mengusulkan dan mengevaluasi sistem manajemen bencana yang menggunakan Intelligent Sistem Transportasi termasuk Vehicular Ad hoc Networks (VANET), teknologi mobile dan Cloud Computing.

Berdasarkan hasil pemetaan peneliti mengenai riset evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana, topik penelitian mengenai evaluasi pengurangan risiko bencana masih terfokus pada evaluasi strategi penanggulangan bencana,

⁷ Zubaida Alazawi, Omar Alani, Mohammad B. Abduljabar, Saleh Altowajiri, Rashid Mehmood . 2014. *A Smart Disaster Management System for Future Cities*. International journal of School Computing Science and Engineering University of Salford Manchester, UK

evaluasi kinerja penanggulangan bencana, evaluasi program penanggulangan bencana serta evaluasi penanggulangan bencana secara umum. Sedangkan topik penelitian mengenai evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana masih minim untuk ditemukan. Terkait evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana terdapat beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Eni Ratnawati,dkk. (2022) menyatakan bahwa tingkat efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Madiun belum efektif secara maksimal meskipun untuk beberapa inditator sudah mencapai target. Sedangkan indikator Persentase korban terdampak bencana yang ditangani dan indikator persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.⁸

Selanjutnya penelitian oleh Mochamad Rizki Fitrianto (2020) menunjukan bahwa Kabupaten Kediri termasuk kedalam salah satu dari wilayah administratif di Jawa Timur yang memiliki indeks kebencanaan tinggi. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana yang ada saat ini ada beberapa indikator dalam evaluasi menurut William N. Dunn yang belum tercapai dengan optimal.⁹

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana yang pada akhirnya dapat menciptakan suatu kebaruaran didalam penelitian terkait penanggulangan bencana. Meskipun pada

⁸Eni Ratnawati, Suwardi, Herning Suryo Sardjono. 2022. *Evaluasi Strategi Penanggulangan Bencana di Kota Madiun Tahun 2022*. JI@P. Vol.12 No.2. ISSN. 2355-4223. e-ISSN. 2808-0211

⁹ Mochamad Rizki Fitrianto. 2020. *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi pada BPBD Kabupaten Kediri)*. JIAP. Vol. 6. No. 2. ISSN 2302-2698. e-ISSN 2503-2887

dasarnya sama-sama penelitian yang bertemakan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana, namun terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini, perbedaan tersebut terletak pada sudut pandang penelitian ini, ketika penelitian yang dilakukan oleh Eni Ratnawati, dkk melihat kepada bagaimana tingkat efektifitas pencapaian target kinerja dari realisasi strategi penanggulangan bencana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Madiun, dan penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Rizki Fitrianto melihat kepada sejauh mana realisasi kebijakan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Kediri.

Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada evaluasi kebijakan dalam pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasaman. Pada penelitian ini juga akan dilihat risiko yang ditimbulkan oleh bencana pada Kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi akan di Kabupaten Pasaman dimana terdapat tiga Kecamatan yakni Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kecamatan Panti dan Kecamatan Tigo Nagari yang menjadi lokus utama dari proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman. Bencana yang terjadi pada ketiga Kecamatan tersebut juga bervariasi antara lain seperti bencana banjir, tanah longsor dan gempa bumi.

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman ini merupakan suatu penelitian yang menarik dan penting untuk dilakukan, karena peneliti melihat belum adanya kajian literatur terdahulu yang membahas tentang penelitian ini. Padahal Kabupaten Pasaman merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang sangat rawan akan terjadinya bencana

alam serta dampak yang ditimbulkan dari bencana juga dinilai sangat besar dan kompleks. Hal ini dapat dilihat ketika bencana terjadi pada Kecamatan yang rawan akan terjadinya bencana di Kabupaten Pasaman seperti Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kecamatan Panti dan Kecamatan Tigo Nagari.

Pada Kecamatan Mapat Tunggul Selatan pemerintah dinilai cukup sulit untuk melakukan proses penanganan ketika bencana seperti banjir dan tanah longsor menimpa wilayah tersebut, hal ini dikarenakan akses lokasi yang terletak cukup jauh dan cukup terisolir, akses jalan yang belum rampung untuk dilewati serta akses komunikasi serta ketersediaan jaringan yang masih menjadi permasalahan utama pada wilayah ini. Selanjutnya yang terjadi pada Kecamatan panti peristiwa bencana terutama bencana banjir sering terjadi pada daerah jalan lintas antar provinsi sehingga menghambat proses arus transportasi yang pada akhirnya akan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Tigo Nagari dimana peristiwa bencana banjir yang disertai tanah longsor juga sering terjadi pada daerah jalan lintas antara Kabupaten Pasaman ke Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Agam.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasaman dapat dilihat peneliti sudah berjalan walaupun belum dapat mencapai target yang optimal, hal ini mungkin dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasaman dari segi jumlah dan kompetensi, kurangnya sarana prasarana yang dimiliki, sehingga program dan kegiatan yang dimiliki tidak dapat teralisasi secara sepenuhnya. Sedangkan mengenai pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana saat ini pihak BPBD Kabupaten Pasaman sudah melakukan

beberapa kegiatan seperti sosialisasi walaupun kegiatan tersebut belum terlaksana secara menyeluruh pada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal pada daerah Kecamatan yang rawan akan terjadinya bencana alam di Kabupaten Pasaman.

Seharusnya kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana harusnya dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sehingga dapat mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, melakukan perencanaan sebelum melakukan penanggulangan bencana agar penanggulangan berjalan sesuai rencana serta membangun kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman.

Hal ini juga dapat diartikan bahwa perlunya proses monitoring yang dilakukan pihak BPBD Kabupaten Pasaman selaku *leading sector* yang bertanggung jawab akan proses penanggulangan bencana, dimana pihak BPBD Kabupaten Pasaman dituntut agar mampu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat terkait bencana, hal ini tentu membutuhkan suatu kebijakan penanggulangan bencana yang mumpuni dan mampu menimalisir risiko bencana. Sedangkan dalam proses pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana ini tentu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait kebencanaan. Perlunya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dengan tujuan untuk memastikan proses dan keberlanjutan dari kebijakan ini .

Berdasarkan berbagai paparan untaian fenomena diatas, maka perlu dilakukan kajian evaluasi yaitu evaluasi yang dilakukan dengan konsep akuntabilitas, dampak dan hasil tentang apa yang telah tercapai atau yang tidak tercapai terkait kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman dengan tujuan untuk mengetahui apakah tujuan tercapai dan apakah proses implementasi berhasil dalam menggerakkan program ke arah yang diinginkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang peneliti rancang berdasarkan realisasi akan kebijakan pengurangan risiko bencana serta proses tindak lanjut yang dilaksanakan dari hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasaman ini pada tingkat Kecamatan di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kecamatan Panti serta Kecamatan Tigo Nagari yang memiliki tingkat kerawanan tinggi akan bencana banjir di Kabupaten Pasaman. Sehingga melahirkan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana hasil evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman agar dapat melihat dampak dan manfaat dari kebijakan pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasaman sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap instrumen terkait dalam proses pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman. Sehingga kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman

dapat terealisasi secara optimal dan dapat mencapai tujuannya yakni meminimalisir risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Pasaman.

1.4 Batasan Penelitian

Dikarenakan luasnya indikator dan pembagian tahapan dalam kebijakan penanggulangan bencana ini, maka peneliti melakukan batasan penelitian untuk melakukan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana dalam konteks pengurangan risiko bencana yaitu pada tahapan pra bencana atau kondisi pada saat tidak terjadi bencana saja, yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasaman pada tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut ini :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Administrasi Publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang Evaluasi Kebijakan. Dengan demikian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya serta Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian Selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman khususnya bagi Dinas terkait yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman yang terlibat langsung dalam proses evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman ,dan diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi, masukan, pertimbangan, dan acuan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana.



